

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL

Dian Novita Sari

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta
e-mail: diannovita510@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the significance of the influence of the General Allocation Fund, Special Allocation Fund and Regional Income partially or simultaneously to the allocation of capital expenditure on district / city in the province of Central Java. The results of the analysis we concluded that the General Allocation Fund partially no significant effect on the allocation of capital expenditure on district / city in Central Java province Period 2011 - 2013. While the Special Allocation Fund and Regional Income partially significant effect on the allocation of capital expenditures. The results of simultaneous analysis showed that the General Allocation Fund, Special Allocation Fund and Regional Income significant effect on the dependent variable is the allocation of capital expenditure on district / city in Central Java province Period 2011 - 2013. The results of the analysis of the value of the coefficient of determination obtained Adjusted R Square = 0.799 means it is known that the influence of the independent variables are given by the General Allocation Fund, Special Allocation Fund and Regional Income for the dependent variable is capex at Regency / City in Central Java Province Period 2011 - 2013 by 79,9 percent while the rest (100% - 79,9%) = 10,1 percent influenced by other factors beyond the variables studied.

Keywords: *General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Local Revenue and capital expenditure*

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pembangunan daerah juga berarti memampukan daerah untuk mengelola sumber daya ekonominya secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan daerah dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni pertama, pendekatan sentralisasi dan kedua, pendekatan desentralisasi. Pendekatan sentralisasi mengandung arti bahwa pelaksanaan pembangunan sepenuhnya merupakan wewenang pusat dan dilaksanakan oleh para birokrat di pusat. Sedangkan pendekatan desentralisasi mengandung arti bahwa pembangunan daerah – melalui desentralisasi atau otonomi daerah – memberikan peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*) di daerah. Artinya pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan atas prinsip efektif, efisien, partisipatif, terbuka (*transparency*), dan akuntabilitas (*accountability*).

Kebijakan dan tugas umum pemerintahan serta implementasi pembangunan di daerah di masa lampau merupakan wewenang dan tanggung jawab penuh dari pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah pusat yang sangat besar tersebut ternyata tidak hanya berdampak positif bagi pembangunan, tetapi disadari juga menimbulkan efek negatif antara lain produk domestik

regional bruto (*gross domestic regional product*) yang relatif sangat lamban, serta panjangnya birokrasi pelayanan publik karena harus menunggu petunjuk dari para pejabat pusat.

Otonomi daerah merupakan solusi alternatif dalam mengatasi berbagai permasalahan di atas. Indonesia memasuki era otonomi daerah sejak tanggal 1 Januari 2001. Pelaksanaan otonomi daerah mengacu pada UU nomor 22 tahun 1999 mengenai pembagian kewenangan dan fungsi (*power sharing*) antara pemerintah pusat dan daerah dan UU nomor 25 tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah yaitu pengaturan pembagian sumber-sumber daya keuangan (*financial sharing*) antara pusat-daerah sebagai konsekuensi dari adanya pembagian kewenangan tersebut.

Kondisi ini membawa implikasi pada pelimpahan kewenangan antara pusat dan daerah dalam berbagai bidang. Otonomi daerah yang dilaksanakan berdampak terhadap sistem desentralisasi, yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi (termasuk menyusun program-program pembangunan daerah) dan perencanaan lainnya yang dilimpahkan dari pusat ke daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur sumber daya yang ada untuk meningkatkan kemajuan dan kemakmuran masyarakat.

Di era otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu melakukan alokasi sumber daya yang efisien. Kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya secara efisien tercermin dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah selaku perencana, di mana hal ini akan membawa dampak pada keberhasilan ekonomi daerah secara optimal. Adanya otonomi diharapkan setiap daerah mampu mengembangkan potensi baik sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya untuk meningkatkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat daerah. Pelaksanaan otonomi daerah menuntut adanya suatu kemandirian daerah didalam berbagai aspek terutama aspek perencanaan, keuangan, dan pelaksanaan.

Komponen utama dari otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal, di mana pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman, maupun dana perimbangan. Sebab pelayanan publik tidak akan dapat berjalan optimal apabila tidak didukung oleh anggaran dana yang memadai. Pelaksanaan otonomi daerah membawa konsekuensi dalam hal anggaran belanja modal yang sangat bervariasi antar daerah setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal dan belum seperti yang diharapkan, disinyalir terjadi ketimpangan yang cukup besar antara Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah.

Indikator yang mempengaruhi alokasi belanja modal pada penelitian ini adalah dibatasi pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana alokasi Umum adalah merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan antar daerah, dana alokasi dimaksudkan untuk membantu kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu sesuai dengan urusan dan prioritas daerah itu sendiri, dengan tujuan untuk pemerataan dan keadilan secara selaras demi menggilir kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai penyelenggaraan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian Vella Kurniasih Fitri (2014) menunjukkan hasil secara parsial variabel Dana Alokasi Umum (DAU), tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Sumber PAD terbesar adalah pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan asli daerah lain yang sah (Vella Kurniasih Fitri, 2014: 4). Hasil penelitian Vella Kurniasih Fitri (2014) menunjukkan hasil secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan menurut Yovita (2011) PAD tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Faktor ketiga yang mempengaruhi alokasi belanja modal yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu. DAK bertujuan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah (Darise, 2008). Dana dari Pemerintah Pusat digunakan oleh Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan kepada publik (dapat digunakan untuk meningkatkan belanja modal).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Vella Kurniasih Fitri (2014) yang meneliti mengenai pengaruh Rasio Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2009-2012. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Vella Kurniasih Fitri (2014) yaitu dalam penelitian ini menambahkan variabel dana alokasi khusus dan tidak menggunakan rasio keuangan. Alasan tidak menggunakan rasio keuangan, karena pengaruh rasio keuangan terhadap alokasi belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Perbedaan lainnya dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada periode penelitian dan objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Vella Kurniasih Fitri (2014) periode penelitiannya adalah tahun 2009-2012, dengan objek penelitian yang digunakan adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Sedangkan dalam penelitian ini periode penelitian yang digunakan adalah periode terbaru yaitu periode 2011 - 2013 dan sebagai objek penelitiannya adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis signifikansi pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah secara parsial maupun secara simultan terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

HIPOTESIS

- H₁: Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal
- H₂: Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal
- H₃: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal
- H₄: Dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian survei pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2011 - 2013. Peneliti bertujuan untuk menguji pengaruh DAU, DAK dan PAD terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2011 - 2013. Adapun alat analisis untuk menguji pengaruh antar variabel menggunakan analisis regresi linear berganda.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebanyak 35 kabupaten/kota yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Jumlah sampel yang digunakan adalah seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebanyak 35 kabupaten/kota, sehingga merupakan penelitian sensus.

Definisi operasional variabel dan pengukurannya adalah sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horisontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. DAU diperoleh dengan melihat dari Dana Perimbangan yang ada di Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Dana Alokasi Umum dalam penelitian ini diukur dengan satuan ribu rupiah.

2. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Irawati,2008). DAK diperoleh dengan melihat dari Dana Perimbangan yang ada di Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Dana Alokasi Khusus dalam penelitian ini diukur dengan satuan ribu rupiah.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah merupakan realisasi penerimaan asli daerah yaitu: pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini diukur dengan satuan ribu rupiah.
4. Alokasi Belanja Modal
Alokasi belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, rneningkatkan kapasitas dan kualitas asset. Alokasi Belanja modal diukur dengan satuan ribu rupiah.

Teknik analisis data menggunakan:

1. Uji Asumsi Klasik
 - a. Uji multikolinearitas bertujuan mendeteksi adanya multikolinearitas dengan melihat nilai *tolerance* dan *Varians Inflation Factor (VIF)* yang dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS.
 - b. Uji autokorelasi dilakukan dengan uji *Run* bertujuan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak.
 - c. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji *Glejser*, yaitu dengan cara meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen.
 - d. Uji normalitas atas residual dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* melalui bantuan komputer program SPSS.
2. Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda.

HASIL PENELITIAN

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah model regresi linear ganda dalam penelitian ini benar-benar menunjuk-kan hubungan yang signifikan dan representatif atau BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) dilakukan pengujian asumsi klasik dengan hasil seperti tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Uji Multikolinearitas	Tolerance (0,295); (0,309); (0,901) > 0,1 VIF (3,394); (3,232); (1,110) < 10	Tidak ada multikolinearitas
Uji Autokorelasi	p (0,735) > 0,05	Tidak ada Autokorelasi
Uji heteroskedastisitas	P (0,378); (0,248); (0,302) > 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Uji Normalitas	p (0,586) > 0,05	Residual normal

Sumber: Pengolahan data sekunder 2014

2. Uji Hipotesis

Untuk menguji pengaruh variabel bebas yaitu Dana Alokasi Umum (X_1), Dana Alokasi Khusus (X_2) dan Pendapatan Asli Daerah (X_3) terhadap variabel terikat yaitu Alokasi belanja modal (Y). menggunakan analisis regresi linear berganda.

Tabel 2
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien	t	Sig.
(Constant)	73203858.660	1.561	.129
DAU (X_1)	.047	.390	.699
DAK (X_2)	2.510	2.382	.024
PAD (X_3)	.876	9.064	.000

F-hitung = 45,922
Sig. F = 0,000* $\alpha = 0,05$
R Square = 0,816
Adjusted R Square = 0,799

Sumber: Data penelitian diolah

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan garis regresinya sebagai berikut:

$$Y = 73203858,660 + 0,047X_1 + 2,510X_2 + 0,876X_3$$

Interpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah:

- a : 73203858,660 artinya jika Dana Alokasi Umum (X_1), Dana Alokasi Khusus (X_2) dan Pendapatan Asli Daerah (X_3) sama dengan nol, maka Alokasi belanja modal (Y) adalah sebesar Rp. 73.203.858,660.
- b_1 : 0,047 artinya pengaruh variabel Dana Alokasi Umum (X_1) terhadap Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013 positif, artinya apabila Dana Alokasi Umum meningkat, maka dapat meningkatkan Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013, dengan asumsi variabel Dana Alokasi Khusus (X_2) dan Pendapatan Asli Daerah (X_3) dianggap tetap.
- b_2 : 2,510 artinya pengaruh variabel Dana Alokasi Khusus (X_2) terhadap Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013 positif, artinya apabila Dana Alokasi Khusus meningkat, maka dapat meningkatkan Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013, dengan asumsi variabel Dana Alokasi Umum (X_1) dan Pendapatan Asli Daerah (X_3) dianggap tetap.
- b_3 : 0,876 artinya pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (X_3) terhadap Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013 positif, artinya apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat, maka dapat meningkatkan Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013, dengan asumsi variabel Dana Alokasi Umum (X_1) dan Dana Alokasi Khusus (X_3) dianggap tetap.

Dari analisis tersebut, maka variabel yang dominan pengaruhnya terhadap Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013 adalah variabel Dana Alokasi Khusus (X_2), karena nilai koefisien regresinya paling besar yaitu 2,510 di antara koefisien regresi variabel bebas yang lain (Dana Alokasi Umum (X_1) sebesar 0,047, Pendapatan Asli Daerah (X_3) sebesar 0,876.

Hasil analisis uji t adalah sebagai berikut:

- a. Pengujian signifikansi pengaruh Dana Alokasi Umum (X_1) terhadap Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013 adalah sebagai berikut:

Karena *probability value* sebesar $0,699 > 0,05$ maka H_0 diterima berarti ada pengaruh yang positif dan tidak signifikan Dana Alokasi Umum (X_1) terhadap Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013. Sehingga hipotesis ke-1 yang berbunyi: “Dana Alokasi Umum Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Alokasi Belanja Modal”, tidak terbukti kebenarannya.

- b. Pengujian signifikansi pengaruh Dana Alokasi Khusus (X_2) terhadap Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013 adalah sebagai berikut:

Karena *probability value* sebesar $0,024 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang positif dan signifikan Dana Alokasi Khusus (X_2) terhadap Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013. Sehingga hipotesis ke-2 yang berbunyi: “Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Alokasi Belanja Modal”, terbukti kebenarannya.

- c. Pengujian signifikansi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_3) terhadap Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013 adalah sebagai berikut:

Karena *probability value* sebesar $0,005 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah (X_3) terhadap Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013. Sehingga hipotesis ke-3 yang berbunyi: “Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal”, terbukti kebenarannya.

3. Uji F

Hasil analisis diperoleh *probability value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan variabel bebas yaitu Dana Alokasi Umum (X_1), Dana Alokasi Khusus (X_2) dan Pendapatan Asli Daerah (X_3) secara simultan terhadap variabel terikat yaitu Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013. Sehingga hipotesis ke-4 yang berbunyi: “Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal”, terbukti kebenarannya.

4. Koefisien Determinasi

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai *Adjusted R Square* = 0,799 berarti diketahui bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas yaitu Dana Alokasi Umum (X_1), Dana Alokasi Khusus (X_2) dan Pendapatan Asli Daerah (X_3) terhadap variabel terikat yaitu Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013 sebesar 79,9 persen sedangkan sisanya ($100\% - 79,9\%$) = 10,1 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi belanja modal

Berdasarkan hasil penelitian, membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vella Kurniasih Fitri (2014) yang menyimpulkan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Hal ini cukup beralasan karena Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan belum dibagikan secara merata dan menyeluruh. Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya. Bagi daerah yang minim akan sumber daya alamnya DAU adalah sumber pendapatan yang penting guna mendukung pembiayaan operasional sehari-hari serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerahnya. Dari tiga puluh lima kabupaten/kota menunjukkan bahwa DAU antar daerah tidak seimbang. Jumlah tersebut tidak dapat memberikan pengaruh yang besar pada alokasi belanja modal di kabupaten/kota. Oleh karena itu penerimaan DAU tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pelayanan publik dan pembangunan yang berkesinambungan.

2. Pengujian signifikansi pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi belanja modal

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Dina Selvia Martini dkk (2014) dan Sheila Ardhian Nuarisa (2013) yang menyimpulkan bahwa DAK berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hal tersebut karena DAK merupakan dana alokasi yang diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah. Sehingga semakin tinggi Dana Alokasi Khusus maka Alokasi Belanja Modal juga akan meningkat.

3. Pengujian signifikansi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi belanja modal

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ni Luh Dina Selvia Martini dkk (2014), Sheila Ardhian Nuarisa (2013) dan Vella Kurniasih Fitri (2014) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Hal ini terbukti semakin banyak PAD yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat, yang berarti ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu untuk mandiri dengan manajemen keuangan yang transparansi, dan akuntabel.

KESIMPULAN

Pengujian signifikansi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013 diperoleh kesimpulan ada pengaruh yang positif dan tidak signifikan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013. Pengujian signifikansi pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013 diperoleh kesimpulan ada pengaruh yang positif dan signifikan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013. Pengujian signifikansi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013 diperoleh kesimpulan ada pengaruh yang positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013.

Hasil analisis uji F diperoleh kesimpulan ada pengaruh yang signifikan variabel bebas yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan terhadap variabel terikat yaitu Alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013. Hasil analisis koefisien determinasi diperoleh nilai *Adjusted R Square* = 0,799 berarti diketahui bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap variabel terikat yaitu Alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2013 sebesar 79,9 persen sedangkan sisanya ($100\% - 79,9\%$) = 10,1 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2004, *Manajemen Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Abdullah, 2008, Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan, *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Volume 2 No. 2 Tahun 2008.
- Imam Ghozali, 2005, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Badan. Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Irawati, 2008, *Akuntansi Dasar 1 & 2*, Pustaka, Jakarta.
- Machfud Sidik, 2002, *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, Orasi Ilmiah Disampaikan pada Acara Wisuda XXI STIA LAN, Bandung, 10 April 2002.
- Mardiasmo, 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Marihot P. Siahaan, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ni Luh Dina Selvia Martini dkk, 2014, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Buleleng Tahun 2006 – 2012, *e-Journal Bisma*, Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Manajemen, Volume 2 Tahun 2014..
- Sheila Ardhian Nuarisa, 2013, Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, *Accounting Analysis Journal*, Volume 2 No. 1 Tahun 2013.
- Situngkir, 2009, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Suhanda, 2007, *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, Andalas Lima. Sisi, Padang.
- Syaiful, 2008, *Belanja Barang dan Belanja Modal dalam kaidah akuntansi Pemerintah*, Tim Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Vella Kurniasih Fitri, 2014, Pengaruh Rasio Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2009-2012, *Jurnal Online Mahasiswa*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2014.